

Demokratisasi Selama Pandemi COVID-19: Studi Kasus Rasisme di Amerika Serikat

Indy Nurul Auliya Putri Zulfah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: indy.inarizu@gmail.com

Abstract

The United States has experienced the decline of democracy in the past decade. This study aims to describe the importance of democratization during Covid-19 pandemic with a case study of racism in the United States. Through the concepts of democracy and democratization, with a qualitative approach method, the author intends to analyze the urgency of democratization in the United States in overcoming the increase cases of racism during the Covid-19 pandemic. The result showed that the role of democracy in overcoming cases of racism in the United States had a big influence, both during the pandemic and post-pandemic conditions.

Amerika Serikat telah mengalami kemunduran demokrasi dalam satu dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya demokratisasi selama pandemi Covid-19 dengan studi kasus rasisme di Amerika Serikat. Melalui konsep demokrasi dan demokratisasi, dengan metode pendekatan kualitatif, penulis bermaksud menganalisis urgensi demokratisasi dalam negeri Amerika Serikat dalam mengatasi peningkatan kasus rasisme selama pandemi Covid-19 berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran demokrasi dalam mengatasi kasus rasisme di Amerika Serikat membawa pengaruh besar, baik selama kondisi pandemi covid-19 maupun pasca pandemi.

Keywords: democracy; democratization; United States of America; racism

Latar belakang

Amerika Serikat dalam sejarah ilmu politik mengawali adanya konsep demokrasi di dunia. Peranan Amerika Serikat pada demokratisasi negara-negara di dunia berlangsung sejak era Perang Dunia II hingga abad ke-21. Salah satu hal yang melatar-belakangi Amerika Serikat untuk membawa ideologinya adalah usaha untuk memperkuat posisi geopolitik pasca perang dunia II. Hal ini tidak jauh dari kepentingan nasional Amerika Serikat dalam aspek ekonomi seperti potensi menguasai sumber daya alam di negara tertentu. Amerika Serikat (AS)

dalam abad terakhir telah memainkan peran penting dalam menjadikan kemajuan nilai-nilai demokrasi sebagai tujuan kebijakan luar negeri yang sah. Kunci kesuksesan demokrasi AS adalah nilai-nilai demokrasi yang menjadi unsur penting dalam kepentingan nasional hingga negara ini tumbuh sebagai kekuatan besar. Diskursus politik yang timbul atas urgensi promosi demokrasi sendiri adalah hubungannya dengan kepentingan ekonomi AS. Keuntungan dari terciptanya pasar bebas sesuai dengan sistem demokrasi liberal adalah peluang ekonomi serta mitra dagang yang dapat diandalkan. Disamping keuntungan ekonomi, demokrasi juga menjadi landasan ideologis yang dapat memperkuat hegemoni AS dalam kepemimpinan global. Dengan demikian, agenda promosi demokrasi menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri AS.

Namun, indeks demokrasi 2020 oleh TEIU mencatat bahwa demokrasi AS masih menempati kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*) karena lebih banyak hal negatif daripada progress positif selama pemerintahan berlangsung di tahun 2020. Penurunan kategori demokrasi AS terjadi sejak tahun 2016. Menurut George Sorensen, pemerintah harus memberi jaminan bagi warganya; kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi, untuk berpendapat, untuk memilih, menjadi pejabat pemerintah, untuk bersaing mencari dukungan, bersaing dan meraih suara, sumber-sumber informasi alternatif, serta keterlibatan dalam kebijakan pemerintah.¹ Pada tahun 2020, tingkat kebebasan individu di AS mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang berdampak pada kasus rasisme di AS. Pandemi menghadirkan dampak tersendiri bagi kelompok ras dan etnis minoritas.

Rasisme yang terjadi di AS tidak lepas dari terbentuknya polarisasi masyarakat AS itu sendiri. Nilai-nilai yang ada sejak awal terbentuknya bangsa memiliki perbedaan yang signifikan sehingga sulit mencapai konsensus. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Stop AAPI Hate* dari hasil pantauan sejak 19 Maret 2020 hingga 28 Februari 2021, terdapat peningkatan laporan insiden dalam laporan *Stop AAPI Hate* sebanyak 503 kasus lebih banyak pada 2021.² Sekitar empat dari sepuluh orang Asia (39%) dan kulit hitam (83%), serta orang Hispanik (27%) mengaku bahwa orang-orang di sekitar mereka kerap bersikap tidak nyaman seperti melontarkan ejekan atau ancaman sejak wabah virus COVID-19. Hanya 13% orang kulit putih yang mengalami situasi negatif tersebut. *Pew Research Center* juga menjelaskan, tiga dari sepuluh warga Asia di Amerika mengalami candaan berbau rasis sejak awal pandemi. The New York Times melaporkan pada Maret 2020, Breonna Taylor, seorang pekerja medis yang terbunuh akibat tembakan yang dilakukan oleh Louisville, seorang petugas kepolisian.³ Pada Juni 2020, barisan militer mengendalikan demonstrasi yang dilakukan masyarakat pasca kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang terbunuh akibat tindakan rasisme oleh kepolisian setempat. Protes yang diinisiasi oleh gerakan *Black Lives Matter* pada 6 Juni 2020 ini menjadi yang

terbesar dalam sejarah AS, dilakukan oleh mayoritas kulit putih di 1.360 kota.⁴ Oleh karena itu, peningkatan kasus rasisme selama pandemi patut mendapat perhatian demi tercapainya tujuan dari nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi dan Demokratisasi di Hadapan Pandemi

Demokrasi di dalamnya mengandung hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang demokratis serta supremasi hukum. Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang melibatkan individu-individu dalam membuat keputusan dengan cara berjuang kompetitif merebut suara rakyat. Sedangkan menurut Joseph A. Scherer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara memperjuangkan keputusan rakyat. Secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini meliputi tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵

Dari beberapa tipe demokrasi secara teoritis, demokrasi liberal merupakan demokrasi yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Demokrasi liberal lebih menekankan pentingnya partisipasi individu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, penegasan terhadap pentingnya keseimbangan yang kuat antara elemen negara sangat perlu agar demokrasi tidak mengalami penyimpangan. Salah satu bentuk penguatan paradigma menurut Muji Sutrisno akan lebih efektif jika diarahkan kepada tujuan menciptakan “high trust society”. Caranya dengan menjaga kondisi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Tidak hanya di satu sisi, pemerintah juga harus mengontrol iklim dalam sistem pemerintahan sehingga terwujud tertib bersama. Sementara itu, dengan eksistensi demokrasi yang bertahan lebih dari dua puluh lima tahun, studi akademik lebih menitik-beratkan bagaimana demokrasi itu sendiri bisa bertahan. Salah satu cara untuk mempertahankan stabilitas demokrasi adalah demokratisasi.

Demokratisasi dipahami sebagai sebuah proses dinamis yang dibuat oleh perilaku dan pilihan manusia. Studi tentang demokratisasi sangat ditentukan oleh kekuatan struktur seperti negara dengan masyarakat, tradisi organisasi dengan mobilisasi, dan kapasitas negara dengan tatanan global. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya demokratisasi, seperti perkembangan negara, pembangunan ekonomi, serta munculnya kelompok atau kelas pekerja yang kuat sehingga mampu mempromosikan perubahan politik. Sederhananya, demokratisasi membutuhkan sinergi kolektif dari seluruh elemen masyarakat

hingga tingkat individu. Demokratisasi telah menjadi sebuah gerakan global yang tidak lepas dari perkembangan ekonomi politik global dengan adanya liberalisasi pasar. Sebuah pendekatan sebagai kerangka alternatif dilakukan melalui analisis terhadap tiga dimensi utama demokratisasi, yaitu negara, masyarakat sipil, dan tatanan global (globalisasi). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis problematika konsolidasi dengan pemahaman terhadap substansi demokrasi. Masing-masing dimensi tersebut memiliki peran penting agar tidak terjadi tumpang tindih di bawah demokratisasi. Dan ketiga subjek tersebut sangat berpengaruh bagi demokratisasi kontemporer.⁶

Tujuan demokratisasi adalah membangun negara demokratis. Struktur hirarki dalam sebuah negara demokratis melibatkan kekuasaan yang sah, birokrasi, serta mediasi antara negara dengan rakyat. Legitimasi pemerintahnya bertumpu pada perannya sebagai perwakilan rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain negara, masyarakat sipil juga memiliki peran dan tantangan terhadap gelombang demokrasi kontemporer, terutama bagi Schumpeterian yang mengalokasikan peran bagi masyarakat sipil. Peran krusial masyarakat sipil terbentuk karena adanya ruang umum dan privat dimana kegiatan sipil terjadi. Menurut Diamond, beberapa peran masyarakat sipil terhadap demokrasi adalah mengurangi kekuatan negara dan subjek pemerintahan untuk mengawasi publik, menyediakan area bagi warga negara agar meningkatkan kepedulian dan kemampuan terhadap demokrasi, menyediakan sumber daya untuk membantu reformasi ekonomi dan yang paling penting dalam penelitian ini yaitu menawarkan ruang untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, moderasi, dan kemauan untuk melakukan kompromi.⁷

Sementara itu, pandemi *Covid-19* bukan sekedar krisis medis, ini juga merupakan krisis ideologi dan politik. Sebelum pandemi, polarisasi masyarakat telah terjadi. Pandemi *Covid-19* menciptakan dilema demokrasi sehingga reaksi politik warga negara juga beragam. Sebagian besar penduduk mengalami tekanan sehingga warga negara memperbaharui keyakinan mereka terhadap demokrasi. Perpecahan ras dan kelas yang terjadi di AS seakan menjadi hantu masa lalu yang hingga hari ini belum selesai. Akibatnya, terjadi kesenjangan penduduk yang justru menciptakan ketakutan bersama daripada tanggung jawab bersama. Padahal, demokrasi yang sukses sangat membutuhkan partisipasi warga negaranya. Terdapat beberapa artikel jurnal yang mendasari penelitian ini, di antaranya oleh Danyelle Solomon dkk. yang menekankan fakta bahwa perbedaan ras dan kelas menyebabkan kesenjangan antar warga terjadi sehingga berpengaruh pada hak pilih dan partisipasi dalam pemerintahan menyebabkan kesejahteraan sebagai tujuan demokrasi belum dan sulit terlaksana.⁸ Kemudian artikel Jennifer Ho mengenai supremasi kulit putih di AS yang telah terjadi sepanjang sejarah sehingga perlu meningkatkan kesadaran untuk menegakkan rasa solidaritas anti-rasisme.⁹ Selain itu, sosiolog Gunmar

Myrdal dalam bukunya “An American Dilemma” mengkritik kesadaran moral orang kulit putih yang menciptakan asumsi anti-Negro dalam kehidupan sosial-ekonomi.¹⁰

Sedangkan penelitian ini mendeskripsikan demokratisasi selama pandemi *Covid-19* dengan studi kasus rasisme di AS dengan mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan oleh tiga elemen, yaitu negara, masyarakat sipil, dan tatanan global dalam memahami nilai-nilai dasar demokrasi dalam perjalanan AS untuk mewujudkan demokratisasi yang lebih baik. Peneliti membatasi masa pandemi yang akan dihitung dari tanggal 11 Maret 2020 hingga 30 April 2021, tepat pada 100 hari kepemimpinan Presiden Joe Biden. Hal ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan penanganan *Covid-19* pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik hingga 100 hari masa kepemimpinan Presiden Joe Biden yang diusung oleh Partai Demokrat. Sebagaimana ulasan diatas, bahwa demokratisasi dipengaruhi oleh peran seluruh elemen tidak terkecuali pemerintah.

Rasisme: Dilema Masyarakat Amerika Serikat

Berbicara tentang ras, hal yang dimaksud bukan tentang kategori biologis maupun genetis saja. Ras merupakan sebuah konstruksi sosial yang dibentuk berdasarkan penerimaan dan perlakuan dalam norma-norma kehidupan. Definisi ras tidak pernah tetap, seiring dengan hubungan antar kelompok sosial yang selalu berkembang. Salah satu permasalahan dalam demokrasi Amerika adalah rasisme struktural (*structural racism*). Manning Marable dalam opininya memahami bahwa demokrasi multikultural yang dimaksud dalam kehidupan Amerika adalah: sebuah masyarakat sipil yang memperlakukan warga negara dengan penuh keadilan dan kehormatan. Terdapat tiga elemen utama yang mampu meruntuhkan penghalang struktural terhadap ras; pemimpin, organisasi politik, dan institusi. Sementara itu, kesulitan terbesar dari akar rasisme dalam kesadaran Amerika adalah menentukan pelaku rasisme, apakah itu negara atau masyarakat? Apakah rasisme ada mendahului identitas nasional?

Robert Lieberman, seorang ilmuwan politik menyatakan:

“Racial division in any society is not a simple fact: it is a complex condition. Deeply contextual and situated in a set of particular social relations. It is the product not merely of shades of skin pigmentation distributed among the population but of the belief that such differences matter and above all of structures that constitute regular patterns of social, economic, and political understanding and behavior according to these shadings. Political institutions, one form that such structures can take, can thus reflect the racial

*basis of social distinctions in the society's power structure. The state, in short, may stand on a racial foundation"*¹¹

Menurut *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* tahun 1965 pasal 1, definisi diskriminasi rasial adalah: "segala pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang bertujuan atau berdampak meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, pada landasan yang sama, Hak Azasi Manusia (HAM), dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan politik lainnya."¹² Kemajuan rasial di Amerika memiliki sejarah panjang. Beberapa kesenjangan yang masih harus diperhatikan di antaranya *outcome* kesehatan yang tidak setara, tempat perawatan kesehatan, dan lingkungan sekitar yang membebankan biaya hidup tinggi serta pemberi pinjaman yang kasar.¹³

Sementara itu dari sudut pandang politik, sejak tahun 1960-an, sistem partai AS dan pemilihan telah mengalami penataan ideologis. Pembagian masyarakat antara mayoritas kulit putih dan minoritas kulit putih yang tumbuh dinamis menyebabkan nilai-nilai, gaya hidup, moralitas, dan pandangan mengenai peran sekaligus pemerintahan yang ideal tercermin dalam partai politik. Pergerakan kaum pekerja kulit putih dari barisan Demokrat ke Partai Republik telah terjadi sejak 1964, saat Lyndon Johnson menyelaraskan Partai Demokrat dengan perjuangan hak-hak sipil orang Afrika-Amerika. Kemudian pergeseran pemilih dari Demokrat terus terjadi sehingga penyesuaian partai berangsur tertata sampai terpilihnya Presiden Obama tahun 2008. Presiden Barack Obama merupakan presiden bi-rasial Afrika-Amerika pertama, mewakili posisi minoritas dengan sejarah panjang diskriminasi. Setelah pemilu 2008, mobilisasi perlawanan kelompok kulit putih, konservatif, dan Kristen Evangelis bersatu dalam gerakan populis *Tea Party* dengan menyuarakan *Birther* (keraguan atas tempat lahir Presiden Barack Obama). Donald Trump merupakan salah satu tokoh populis yang berhasil memimpin Amerika Serikat selama satu periode masa kepresidenan.

Diskriminasi rasial terhadap komunitas *Asian American and Pasific Islander/AAPI* (warga Asia-Amerika) selama masa pandemi *Covid-19* sangat memprihatinkan. Jenis-jenis tindakan rasisme yang dialami komunitas Asia-Amerika berupa pelecehan, hinaan rasial, diskriminasi, dan serangan fisik. Media sosial sebagai ruang baru yang ramai dikunjungi manusia juga menjadi sarana untuk menyebar stereotip buruk terhadap komunitas Asia-Amerika. Beberapa kasus kekerasan tersebut di antaranya; seorang keturunan Filipina-Amerika berusia 61 tahun menderita luka sayat di wajah dalam perjalanan menggunakan kereta bawah tanah di New York; seorang perempuan lanjut usia di Brooklyn, New York, ditampar dan dibakar oleh dua orang; seorang imigran berusia 84 tahun asal Thailand meninggal setelah didorong sengaja hingga jatuh

di San Francisco, California.¹⁴ Statistik *Stop AAPI Hate* mencatat sejak 19 Maret 2020 hingga 31 Desember 2020, kejadian yang menargetkan komunitas AAPI paling banyak menargetkan orang China (41%), Korea (15%), Vietnam (8%), Filipina (7%), dan 29% sisanya melanda etnis lain.¹⁵

Selain itu, dalam beberapa kesempatan kerjanya, mantan presiden Donald Trump dan pendukungnya yang anti-China, menyebut virus *Covid-19* sebagai “Kung Flu” atau virus China. Latar belakang pernyataan ini dikaitkan dengan kebijakan perdagangan, negosiasi, serta kebijakan luar negeri Donald Trump selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan hasil penelitian *Pew Research Centre* tentang sifat polarisasi AS, para penulis menunjukkan perbedaan pada “nilai-nilai inti Amerika” antara pendukung Donald Trump dan Joe Biden sebagai dua kandidat presiden AS pada pemilu presiden 2020. Hal ini menyebabkan penurunan budaya politik sehingga pada tahun 2020 AS memiliki budaya politik terlemah, dari angka 7,50 pada tahun 2019 menurun hingga skor 6,25 pada 2020.¹⁶ Alasan lain bagi masyarakat untuk membenarkan tindakan rasisme terutama sejak pandemi berlangsung adalah perbedaan ciri fisik fenotipik lintas ras, sehingga kepercayaan akan perbedaan kerentanan, penularan, dan periode inkubasi virus *Covid-19* juga berbeda.¹⁷

Diskusi: Peran Elemen Demokratisasi dalam Penanganan Pandemi

Dampak yang dirasakan akibat tindakan rasisme oleh kelompok minoritas, terutama semenjak peningkatan kasus selama pandemi akan dirasakan dalam jangka panjang. Mulai dari kehilangan pekerjaan, tidak memiliki jaminan kesehatan, penyakit mental, hingga pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump telah abai terhadap kemanusiaan dan meningkatkan supremasi kulit putih sehingga pelemahan demokrasi terus terjadi hingga akhir masa jabatannya. Oleh karenanya, demokratisasi menjadi penting dengan melibatkan berbagai elemen berikut:

1. Negara

Pemerintah merupakan subyek paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, terutama selama pandemi *Covid-19*. Segala keputusan sulit harus diambil dalam waktu singkat, berdasarkan informasi terbatas, dengan atau tanpa kemungkinan negosiasi dan kompromi yang menguntungkan. Tindakan efisien akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap demokrasi sehingga secara tidak langsung masa depan demokrasi bergantung pada kebijakan pemerintah hari ini. Hal-hal semacam menetapkan kebijakan *lockdown*, program vaksinasi, dan kebijakan ekonomi menjadikan pemerintah harus bekerja lebih keras. Sejak awal masa jabatan resmi Presiden Joe Biden per 21 Januari 2021, *The White House* telah merilis *Presidential Actions* dalam

Memorandum Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance against Asian Americans and Pasific Islanders in the United States pada 26 Januari 2021. Pernyataan ini berisi pengakuan bahwa Pemerintah Federal secara tidak langsung telah membantu meningkatkan sentimen xenophobia tentang *Covid-19*, melalui para pemimpin politik sebagaimana yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sebagai seorang Presiden, Joe Biden menegaskan dan memerintahkan departemen dan lembaga eksekutif untuk memastikan segala dokumen, tindakan, maupun pernyataan resmi tidak berkontribusi atau menunjukkan rasisme, xenophobia, dan intoleransi terhadap Penduduk Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik.¹⁸

Pasca pernyataan presiden, banyak dari departemen maupun lembaga yang mulai serius menegakkan dan memberlakukan undang-undang anti diskriminasi. Salah satunya seperti yang dilakukan Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman Kantor Kejaksaan Distrik Utara Georgia. Setelah kasus penembakan tragis di Atlanta pada 16 Maret 2021, FBI bekerja sama dengan Kantor Pengacara untuk Distrik Utara Georgia dan Divisi Hak Sipil mendukung pengusutan kasus tersebut sekaligus menemui pemimpin komunitas AAPI.¹⁹ Sebagai tindak lanjut dari memorandum presiden, The White House kembali merilis pernyataan pada 21 Maret 2021, tepat pada peringatan Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield menyatakan harapan untuk menghilangkan wabah diskriminasi rasial di seluruh penjuru dunia, dan mengajak anak-anak untuk meninggalkan dunia yang penuh kebencian.²⁰ Sebagai langkah nyata untuk memerangi rasisme sistemik AS. Pemerintahan Biden juga memasukkan keadilan rasial ke dalam tujuan kebijakan luar negeri AS yang ditangani oleh Departemen Luar Negeri melalui Biro Demokrasi, HAM, dan Perburuhan maupun Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).²¹ Selain itu, dalam 100 hari masa kepemimpinan Biden, calon kabinet dari latar belakang ras dan jenis kelamin lebih beragam meningkat, dengan 50% calon bukan kulit putih dan 46% wanita.²² Tetapi pada peringatan 100 hari masa pemerintahannya, Presiden Joe Biden masih harus melanjutkan komitmennya untuk memajukan HAM di seluruh dunia, dengan menjadikan AS sebagai contoh positif dengan menguatkan penegakan HAM dalam negeri. Tujuan utama Biden haruslah mengubah narasi HAM secara fundamental, membentuk ulang pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip HAM dan tujuan demokrasi itu sendiri. Biden harus menemukan cara, melalui praktik serta kebijakannya untuk menjadikan penegakan HAM sebagai perilaku politik dalam pemerintah AS. Misalnya, dengan memperkuat dan memperluas Undang-undang Perlindungan Pasien dan Perawat Terjangkau (*Obamacare*), dan menjamin hak setiap orang untuk mendapat perawatan kesehatan tanpa harus memeras uang mereka. Penyelesaian masalah diskriminasi rasial dalam segala bidang; kesehatan, pendidikan, sistem peradilan, hingga hak pilih, harus diletakkan dalam prioritas AS.

2. Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil terhadap demokratisasi sangat beragam. Sebagaimana yang dijelaskan Diamond, dengan menyediakan area bagi warga negara agar meningkatkan kepedulian dan kemampuan terhadap demokrasi. Masyarakat sipil dapat menjadi kunci bagi peluang atau kendala politik suatu negara. Adanya struktur mobilisasi dalam jaringan sosial masyarakat akan mempercepat konsensus sehingga semangat perjuangan dapat menjadikan sekumpulan individu-individu di dalamnya bergerak dinamis.²³ Terdapat gerakan sosial yang menjadi pusat koordinasi masyarakat untuk menyuarakan perubahan. Salah satu peran masyarakat AS dalam menyuarakan komunitasnya adalah *Stop AAPI Hate*.

Sebagai respon atas kasus rasisme dan xenophobia terhadap komunitas Asia-Amerika dan Kepulauan Pasifik yang terus meningkat selama pandemi, *Asian Pasific Policy and Planning Council (A3PCON)*, *Chinese for Affirmative Actions (CAA)*, dan *the Asian American Studies Department (AAS)* Universitas Negeri San Francisco meresmikan koalisi *Stop AAPI Hate* pada 29 Maret 2020. Koalisi ini melakukan 5 pokok pendekatan untuk mengatasi rasisme struktural yang terjadi di AS; menjadi agregator dalam insiden rasisme *Anti-AAPI*, menawarkan SDM bagi komunitas terdampak, memberi bantuan teknis sebagai respon cepat dan langkah pencegahan, mendukung langkah pengamanan berbasis masyarakat dan upaya keadilan restoratif, serta advokasi untuk proses pembuatan kebijakan yang melindungi HAM dan hak sipil.²⁴ Dengan adanya kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir dalam jaringan sosial ini, mobilisasi kekuatan masyarakat sebagai salah satu subjek dalam demokratisasi dapat berjalan maksimal. Kemudian, dalam jangka panjang, usaha dari gerakan sipil ini akan mempengaruhi *output* kebijakan pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Badan Legislatif California dengan pengesahan *Assembly Bill* (Rancangan Undang-Undang/RUU) No. 85 oleh Gubernur Gavin Newsom. Undang-undang ini menyediakan anggaran sebesar 7,6 Miliar Dollar Amerika untuk merespon pandemi. Salah satu tujuan pendanaan tersebut untuk mendukung penelitian koalisi *Stop AAPI Hate* dan membantu pelacakan kasus anti-Asia yang meningkat selama pandemi *Covid-19* berlangsung.²⁵

Pada Rabu, 17 Maret 2021, Wali Kota dan Ketua Kepolisian San Fransisco mengumumkan adanya patroli tambahan demi menjaga lingkungan komunitas Asia-Amerika.²⁶ Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari aktivitas warga yang sebelumnya lebih dulu melakukan patroli sukarela hampir setiap malam di *Dragon Gate* yang merupakan gerbang masuk *Chinatown* tertua di San Fransisco. Berbekal peluit dan pamflet, meski lingkungan sekitar telah sepi akibat ketakutan warga atas kejahatan rasial, para sukarelawan berkendara mengitari blok-blok tersebut. Patroli sukarela semacam ini juga tumbuh di lingkungan komunitas Asia-Amerika wilayah Oakland, California, Los Angeles, dan New York sebagai tanggapan atas gelombang rasisme selama pandemi.²⁷ Patroli sukarela

warga juga terjadi karena ketidak-percayaan warga terhadap oknum kepolisian yang selama pandemi justru banyak terlibat dalam kasus rasisme dan meragukan tugas polisi sebagai pelindung masyarakat. Adanya gerakan mandiri masyarakat sipil demi melindungi komunitasnya menjadi pelajaran bagi sebagian masyarakat lain untuk terus menumbuhkan kepedulian, melatih kepekaan sosial, dan penghargaan terhadap hak-hak sipil yang masih sering diabaikan negara. Menurut analisa *The Commonwealth Fund*, sejak Juni 2020 perhatian publik terhadap isu rasisme semakin meningkat (51%) dibanding tahun sebelumnya (44% pada 2018). Sementara itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keterlibatan dan peran pemerintah federal AS khususnya pada lembaga kesehatan juga meningkat pada 2020 sebesar 46% dibanding tahun 2019 sebesar 43%. Pada akhirnya, meski keraguan tetap ada, tetapi harapan masyarakat tetap tinggi.²⁸ Untuk itu, jawaban atas rasisme struktural yang terjadi di AS ada pada masyarakat itu sendiri yakni dengan menemukan konsensus atas keberagaman yang ada.

3. Tatanan Global

Pandemi *Covid-19* yang dirasakan secara global menurut Frances Brown telah menghantam berbagai titik penjurusan demokrasi yang terancam.²⁹ Rasisme yang berpotensi menyebabkan kerusakan sosial, kekerasan, dan disintegrasi batas-batas negara yang ada. Situasi pandemi menuntut pendekatan multi-level dalam menjawab krisis demokrasi yang melemahkan legitimasi demokrasi di berbagai negara. Pada era Trump, pasca tragedi pembunuhan George Floyd di Minneapolis, Pemerintah Afrika dipimpin oleh Afrika Selatan membentuk koalisi lintas kawasan untuk melawan pemerintah AS dengan menuntut penyelidikan terhadap rasisme sistemik dan kekerasan polisi di seluruh dunia. Swiss, Jerman, dan Kosta Rika juga memimpin penolakan bersama terhadap upaya Trump untuk merusak independensi Pengadilan Kriminal Internasional yang bemarkas di Den Haag. Hal ini membuktikan bahwa kredibilitas AS sebagai salah satu promotor demokrasi menurun di mata dunia. Pasca pergantian kepemimpinan presiden, Biden memiliki tugas besar untuk mengembalikan HAM sebagai elemen sentral dari kebijakan luar negeri AS. Untuk itu, dalam konteks demokratisasi kontemporer, tatanan global menyediakan peran lebih besar bagi individu, komunitas, maupun organisasi melampaui batas-batas negara.

Krisis demokrasi yang dirasakan berbagai negara, baik karena keraguan masyarakat terhadap pemerintah maupun kesulitan pemerintah atas pembuatan kebijakan dengan keterbatasan informasi dan waktu, membutuhkan mekanisme sistem koordinasi yang baik. Laporan yang muncul dari berbagai negara berupa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan pentingnya partisipasi sosial yang dilembagakan agar

tersktruktur. Pembahasan makro-politik tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan terhadap penanganan pandemi perlu dilakukan demi membantah asumsi masyarakat mengenai politisasi virus *Covid-19* oleh rezim global. Pendekatan multi-level yang melibatkan pemerintah nasional harus menghubungkan diri dengan rezim internasional, yaitu dalam hal ini misalnya *World Health Organization* (WHO) dalam koordinasi penanganan pandemi.³⁰ Beberapa peran WHO adalah menerbitkan publikasi penelitian seputar perkembangan *Covid-19*, menerima laporan dan informasi terkini dari masing-masing negara di dunia, mendukung kampanye terkait kesadaran masyarakat akan bahayanya virus *Covid-19*. WHO juga mengeluarkan panduan manajemen kerja selama pandemi *Covid-19* yang bersifat sementara pada 3 Desember 2020. Dalam panduan tersebut, terdapat rekomendasi bagi seluruh pemegang kepentingan dalam penanganan pandemi. Dengan adanya WHO, setidaknya dunia memiliki sistem kesehatan yang dapat mewadahi kepentingan seluruh aktor penting selama masa pandemi demi mewujudkan dunia yang lebih baik.

Kesimpulan

Pandemi *Covid-19* memang menghadirkan tantangan dan krisis bagi demokrasi. Salah satu fenomena yang terjadi adalah rasisme sebagaimana yang terus meningkat di AS yang merupakan negara demokratis. Namun, solusi dari berbagai pihak dapat memberikan jalan keluar bagi segala kesulitan selama pandemi *Covid-19*.

Negara sebagai dimensi kunci yang membentuk proses demokratisasi, berperan untuk membuktikan kepercayaan masyarakat, memberi perlindungan, hadir, serta menegakkan hukum bagi setiap individu sesuai haknya. Kemudian masyarakat sipil sebagai dimensi kunci yang membentuk proses demokratisasi, berperan untuk mengubah pola pikir, memahami, serta merenungkan ulang identitas mereka sebagai bagian dari AS.

Dengan lebih menghargai prinsip anti-rasisme, pandemi yang sedang terjadi bisa segera berakhir dengan membawa pelajaran berharga dalam menghapus rasisme struktural. Demokratisasi dalam negeri Amerika Serikat sendiri akan berdampak secara global, karena AS merupakan salah satu promotor demokrasi serta suri tauladan bagi negara-negara demokratis. Demokratisasi kontemporer telah menjadikan globalisasi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat, negara, dan tatanan global yang lebih baik. Maka, peluang untuk menyelesaikan pandemi dari seluruh elemen akan sangat berdampak.

Endnotes

¹ The Economist Intelligence Unit Limited, *Democracy Index 2020 In Sickness and in Health?* (The Economist intelligence Unit Limited, 2021), 42-47.

² Russell Jeung, dkk., 2021, *Stop AAPI Hate National Report*, diakses dari <https://stopaapihate.org/2020-2021-national-report/> pada 14 April 2021.

³ The New York Times, 26 April 2021, *What to Know About Breonna Taylor's Death*, diakses dari <https://www.nytimes.com/article/breonna-taylor-police.html> pada 12 Mei 2021.

⁴ The New York Times, 3 Juli 2020, *Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History*, diakses dari <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html> pada 12 Mei 2021.

⁵ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012, *Demokrasi*, diakses dari eprints.uad.ac.id pada 19 April 2021.

⁶ Jean Grugel and Matthew Louis Bishop, *Democratization: A Critical Introduction* (Houndmills and New York: Palgrave Macmillan, 2014).

⁷ *Ibid.*

⁸ Danyelle Solomon, Connor Maxwell, and Abril Castro, 7 Agustus 2019, *Systematic Inequality and American Democracy*, diakses dari <https://www.americanprogress.org/issues/race/reports/2019/08/07/473003/systematic-inequality-american-democracy/> pada 20 April 2021.

⁹ Jennifer Ho, 26 oktober 2020, *Anti-Asian racism, Black Lives Matter, and COVID- 19*, diakses dari <https://doi.org/10.1080/09555803.2020.1821749> pada 20 April 2021.

¹⁰ Ralph Ellison, 1944, *An American Dilemma: A Review*, diakses dari <https://teachingamericanhistory.org/library/document/an-american-dilemma-a-review/> pada 20 Mei 2021.

¹¹ Robert C. Lieberman, *Shifting the Color Line, Race and American Welfare State* (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 231.

¹² United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 1996, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx> pada 20 Mei 2021.

¹³ Manning Marable, *Structural Racism and American Democracy*, (Durban, South Africa: United Nations Research Institute for Social Development, 2001), 3-4.

¹⁴ Sam Cabral, 4 Maret 2021, *Kejahatan Kebencian terhadap orang Asia-Amerika di AS meningkat: Dari penghinaan hingga pembunuhan*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56249817> pada 20 Mei 2021.

¹⁵ Russell Jeung, dkk. *Op.cit.*

¹⁶ The Economist Intelligence Unit, *Op.cit.*

¹⁷ Isaac Yeboah Addo, *Double Pandemic: racial discrimination amid coronavirus disease 2019*, Social Sciences and Humanities Open, Volume 2 Issues 1, 20 Oktober 2020.

¹⁸ Joseph R. Biden, 26 Januari 2021, *Memorandum Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance Against Asian Americans and Pasific Islanders in the United States*, diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-condemning-and-combating-racism-xenophobia-and-intolerance-against-asian-americans-and-pasific-islanders-in-the-united-states/> pada 20 Mei 2021.

¹⁹ Department of Justice, U.S. Attorney's Office, Nothern District of Georgia, 26 Maret 2021, federal law enforcement leaders address hate crimes and racism targeting the AAPI community, diakses dari <https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/federal-law-enforcement-leaders-address-hate-crimes-and-racism-targeting-aapi-community> pada 20 Mei 2021.

²⁰ The White House, 21 Maret 2021, *Fact Sheet: U.S. Efforts to Combat Systemic Racism*, diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/fact-sheet-u-s-efforts-to-combat-systemic-racism/> pada 21 Mei 2021.

²¹ *Ibid.*

²² Steve Holland, dkk., 28 April 2021, *Biden's first 100 days: COVID-19, jobs, foreign policy, immigration, guns and dogs*, diakses dari <https://www.reuters.com/world/us/bidens-first-100-days-covid-19-jobs-foreign-policy-immigration-guns-dogs-2021-04-27/> pada 21 Mei 2021.

²³ Sidney Tarrow, *Power in Movement* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 19-25.

²⁴ Stop AAPI Hate, 2020, *About AAPI Homepage*, diakses dari <https://stopaapihate.org/> pada 19 April 2021.

²⁵ Ashley Wong, 22 Februari 2021, California Allocates \$1.4 Million to Track Anti-Asian Crimes, The Sacramento Bee, diakses dari <https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article249437955.html> pada 21 Mei 2021.

²⁶ California State Assembly Democratic Caucus, 29 Maret 2021, San Fransisco Adds Street Patrols in Asian American Neighborhoods, diakses dari <https://a19.asmdc.org/news/20210317-san-francisco-adds-street-patrols-asian-american-neighborhoods> pada 21 Mei 2021.

²⁷ Marian Liu and Rachel Hatzipanagou, 25 Februari 2021, *'Nobody came, nobody helped': Fears of anti-Asian violence rattle the community*, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/nation/2021/02/25/asian-hate-crime-attack-patrol/> pada 21 Mei 2021.

²⁸ Eric C. Schneider, dkk., 31 Maret 2021, After a Year of Pandemic and Crisis, How Have Americans' Values Changed?, diakses dari <https://www.commonwealthfund.org/blog/2021/after-year-pandemic-and-crisis-how-have-americans-values-changed> pada 1 Mei 2021.

²⁹ Frances Z. Brown, Saskia Brechenmacher, Thomas Carothers, 6 April 2021, *Democracy and Governance Globally?*. Carnegie Endowment for International Peace, diakses dari <https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470> pada 1 Mei 2021.

³⁰ World Health Organization, 2020, Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response, diakses dari <https://apps.who.int/iris/handle/10665/337333> pada 21 Mei 2021.

References

- Addo, Isaac Yeboah. 2020. "Double Pandemic: Racial Discrimination amid Coronavirus Disease 2019." *Social Sciences & Humanities Open* 2 (1): 100074. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100074>.
- Ashley Wong. 2021. "California Allocates \$1.4 Million to Track Anti-Asian Crimes | The Sacramento Bee." February 22, 2021. <https://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article249437955.html>.
- Buchanan, Larry, Quoc Trung Bui, and Jugal K. Patel. 2020. "Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History." *The New York Times*, July 3, 2020, sec. U.S. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html>.
- California State Assembly Democratic Caucus. 2021. "San Francisco Adds Street Patrols in Asian American Neighborhoods." Official Website - Assemblymember Phil Ting Representing the 19th California Assembly District. March 29, 2021. <https://a19.asmdc.org/news/20210317-san-francisco-adds-street-patrols-asian-american-neighborhoods>.
- Carothers, Frances Z. Brown, Saskia Brechenmacher, Thomas. 2020. "How Will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance Globally?" Carnegie Endowment for International Peace. April 6, 2020. <https://carnegieendowment.org/2020/04/06/how-will-coronavirus-reshape-democracy-and-governance-globally-pub-81470>.
- Department of Justice, U.S. Attorney's Office, and Northern District of Georgia. 2021. "Federal Law Enforcement Leaders Address Hate Crimes and Racism Targeting the AAPI Community." March 26, 2021. <https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/federal-law-enforcement-leaders-address-hate-crimes-and-racism-targeting-aapi-community>.
- Eric C. Schneider, Robert J. Blendon, John M. Benson, Arnav Shah. 2021. "After a Year of Pandemic and Crisis, How Have Americans' Values Changed? | Commonwealth Fund." March 31, 2021. <https://doi.org/10.26099/jyvt-4990>.
- Grugel, Jean. 2002. *Democratization: A Critical Introduction*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, N.Y: Palgrave.

- Ho, Jennifer. 2021. "Anti-Asian Racism, Black Lives Matter, and COVID-19." *Japan Forum* 33 (1): 148–59. <https://doi.org/10.1080/09555803.2020.1821749>.
- Joseph R. Biden Jr. 2021. "Memorandum Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance Against Asian Americans and Pacific Islanders in the United States." The White House. January 26, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/26/memorandum-condemning-and-combating-racism-xenophobia-and-intolerance-against-asian-americans-and-pacific-islanders-in-the-united-states/>.
- Lieberman, Robert C. 1998. *Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Marable, Manning. 2001. "Structural Racism and American Democracy: Historical and Theoretical Perspectives." *Souls* 3 (1): 6–24. <https://doi.org/10.1080/10999949.2001.12098159>.
- Marian Liu, Rachel Hatzipanagos. 2021. "'Nobody Came, Nobody Helped': Fears of Anti-Asian Violence Rattle the Community." *Washington Post*. February 25, 2021. <https://www.washingtonpost.com/nation/2021/02/25/asian-hate-crime-attack-patrol/>.
- Nugroho, Heru. 2015. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Ralph Ellison. 1944. "An American Dilemma: A Review." *Teaching American History*. 1944. <https://teachingamericanhistory.org/library/document/an-american-dilemma-a-review/>.
- Sam Cabral. 2021. "Kejahatan kebencian terhadap orang Asia-Amerika di AS meningkat: Dari penghinaan hingga pembunuhan." *BBC News*. March 4, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56249817/embed>.
- Solomon, Danyelle, Connor Maxwell, and Abril Castro. 2019. "Systematic Inequality and American Democracy," 22.
- Steve Holland,Trevor Hunnicutt, Howard Schneider, Nandita Bose, Jarrett Renshaw, Ted Hesson, Mica Rosenberg; Editing by Heather Timmons, Kieran Murray and Leslie Adler. 2021. "Biden's First 100 Days: COVID-19, Jobs, Foreign Policy, Immigration, Guns and Dogs | Reuters." April 28, 2021. <https://www.reuters.com/world/us/bidens-first-100-days-covid-19-jobs-foreign-policy-immigration-guns-dogs-2021-04-27/>.

Stop AAPI Hate. 2020. "About AAPI Homepage." Stop AAPI Hate. 2020. <https://stopaapihate.org/>.

———. 2021. "2020-2021 National Report." *Stop AAPI Hate* (blog). March 16, 2021. <https://stopaapihate.org/2020-2021-national-report/>.

Stop AAPI Hate Organizations. 2021. "2020-2021 National Report." *Stop AAPI Hate* (blog). March 16, 2021. <https://stopaapihate.org/2020-2021-national-report/>.

The Economist Intelligence Unit Limited. 2021. "Democracy Index 2020." Report. Economist Intelligence Unit. 2021. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>.

The White House. 2021. "Fact Sheet: U.S. Efforts to Combat Systemic Racism." The White House. March 21, 2021. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/fact-sheet-u-s-efforts-to-combat-systemic-racism/>.

United Nation Human Right Office of The High Commissioner. 1996. "OHCHR | International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination." 2021 1996. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>.